

**PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN
2025**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta Karunia-Nya, atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 ini merupakan dokumen Perencanaan PD untuk Program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun dan memuat Rencana Kerja Program dan Kegiatan, yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan guna mencapai sasaran pembangunan

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang, hendaknya Perubahan Rencana Kerja ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Aparatur DPMPTSP Kabupaten Tana Tidung didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tideng Pale, 23 Mei 2025

Kepala Dinas,



Arman Jauhari, SH

NIP. 19750709 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	
TAHUN BERJALAN	10
2.1. Evaluasi Evaluasi Renja SKPD sampai dengan Triwulan I Tahun berjalan sesuai Formulir 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.	10
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH.....	15
BAB IV PENUTUP.....	25

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
Tabel 2.1	Pencapaian Target Indikator Sasaran	10
Tabel 2.2	Pencapaian Target Indikator Program	11
Tabel 2.3	Pencapaian Target Anggaran	12
Tabel 3.1	RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)	16



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Perintis RT.VII Desa Tideng Pale, Kode Pos 77611
Telp/Fax : - Pos El : dpmptsp@tanatidungkab.go.id
Laman : <https://dpmptsp.tanatidungkab.go.id/>

TIDENG PALE

RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : 000.7.2.6/014/SK-PERUBAHAN-RENJA/DPMPTSP/2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Renja SKPD yang telah disahkan oleh Kepala Daerah agar segera ditetapkan oleh Kepala SKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2010;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
15. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.
16. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan daerah Melalui Perubahan rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Surat Edaran Bupati Tana Tidung Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- KEDUA : Perubahan RENJA sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2025.
- KETIGA : Perubahan RENJA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025, sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri
Bab I Pendahuluan
Bab II Evaluasi Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan 1
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV Penutup
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal, 23 Mei 2025

KEPALA,



Arman Jauhari, SH
NIP. 19750709 200212 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung di *Tideng Pale*;
2. Inspektur Kabupaten Tana Tidung di *Tideng Pale*;
3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di *Tideng Pale*;
4. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang buruk merupakan kegagalan awal dalam menentukan pencapaian tujuan, oleh karenanya proses penyusunan perencanaan ini perlu kehati-hatian dan ketelitian dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang, dengan memperhatikan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sedangkan perencanaan pembangunan pada hakekatnya bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Salah satu dokumen perencanaan adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Menurut Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 ayat (1) dan (2) bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung tahun 2025, merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan daerah Melalui Perubahan rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah segera menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025 dan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas Nasional antara lain :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim;
4. Peningkatan Inflasi Daerah;
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
6. Dukungan Swasembada Pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Tema Perubahan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 “ Terwujudnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat tana Tidung”

Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025

1. Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan;
2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Ketahanan Sosial Budaya Ekologi;
3. Penguatan Kemandirian Desa;
4. Pembangunan Konektivitas Wilayah dan Infrastruktur Hijau dengan Pengelolaan Lingkungan Terpadu Yang Berkelanjutan;
5. Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung Kabupaten Tana Tidung tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung tahun berikutnya yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan arah kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032;
8. Undang-undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2);

21. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
23. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026.
25. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan daerah Melalui Perubahan rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
27. Surat Edaran Bupati Tana Tidung Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Renja SKPD sampai dengan Triwulan I Tahun berjalan sesuai Formulir 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah sesuai dengan hasil inputan yang didownload dari aplikasi SIPD-RI

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Renja SKPD sampai dengan Triwulan I Tahun berjalan sesuai Formulir 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

Adapun capaian kinerja indikator sasaran RENJA yang dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Target Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 TW 1	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)	Ket
1	Meningkatkan Realisasi Investasi	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tana Tidung	Realisasi Investasi PMA	Milyar	780.000.000.00	296.373.437.851	37,99	S	
			Realisasi Investasi PMDN	Triliun	1.500.000.000.00	615.616.999.639	41,04	S	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	83	0	0%	SR	

Dari Tabel pencapaian target **Indikator Kinerja Sasaran** dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Realisasi Investasi PMA pada Triwulan I Rp.296.373.437.851 dan realisasi indikator kinerja Realisasi Investasi PMDN pada Triwulan I Rp.615.616.999.639 sedangkan pada indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum tersedia karena baru akan tersedia pada akhir Tahun 2025.

Capaian Indikator Kinerja Program RENJA yang dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Target Indikator Kinerja Program

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100		10,65%	SR	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pembuatan Dokumen Kebijakan Penanaman Modal	%	100	0	0%	SR	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang akan berinvestasi	Investor	2	0	0%	SR	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	100	0	0%	SR	
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Usaha yang memenuhi Aspek Legal	%	90		22,33%	SR	
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dtindaklanjuti	%	100	0	0%	SR	
		Persentase Pengaduan yang terselesaikan/tertangani sesuai SOP	%	100	0	0%	SR	

Dari tabel pencapaian target **Indikator Kinerja Program** dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja program belum tersedia di Triwulan I (31 Maret 2025) terdiri dari Status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 0 Program, Status Tinggi (T) sebanyak 0 Program, Status Sedang (S) sebanyak 0 Program, Status Rendah (R) sebanyak 0 Program dan Status Sangat Rendah (SR) sebanyak 6 Program. Adapun capaian indikator kinerja Program sangat rendah disebabkan realisasi indikator kinerja Program belum

tersedia karena data tersebut baru tersedia pada akhir tahun 2025.

Adapun realisasi anggaran RENJA yang dievaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Target Anggaran

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Persentase Realisasi Anggaran RENJA	Persentase Realisasi Anggaran DPA	Kategori Kinerja Anggaran (Status)
		Pagu RENJA	Pagu DPA	Realisasi			
2.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.326.000.000	7.128.715.100	1.163.918.866	15,89%	16.33%	R
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.517.420.000	5.731.634.500	1.163.918.866	21,09%	20.31%	T
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.999.600	26.999.500	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.600	12.000.200	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.000	14.999.300	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.227.734.832	4.186.420.432	1.163.918.866	0%	27.80%	ST
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.062.014.832	4.027.650.432	1.163.918.866	28,65%	28.90%	ST
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	165.720.000	158.770.000	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.447.000	49.137.000	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31.185.000		0	0%	0%	SR
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	104.262.000	49.137.000	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	597.325.938	818.741.118	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.443.500	54.887.000	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.223.000	193.750.900	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.130.238	123.506.218	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.668.200	56.887.000	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.861.000	389.710.000	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.188.660	48.188.660	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	48.188.660	48.188.660	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.416.400	317.416.400	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.594.000	130.594.000	0	0%	0%	SR

2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.822.400	182.822.400	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.307.570	284.731.390	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.480.000	67.680.000	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.830.000	19.290.000	0	0%	0%	SR
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.997.570	197.761.390	0	0%	0%	SR
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	179.980.800	4.662.000	0	0%	0%	SR
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	179.980.800	4.662.000	0	0%	0%	SR
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	179.980.800	4.662.000	0	0%	0%	SR
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	535.974.300	521.602.100	0	0%	0%	SR
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	535.974.300	521.602.100	0	0%	0%	SR
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	109.995.500	259.000	0	0%	0%	SR
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	425.978.800	521.343.100	0	0%	0%	SR
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	924.614.200	630.817.400	0	0%	0%	SR
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	924.614.200	630.817.400	0	0%	0%	SR
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	397.451.900	383.286.900	0	0%	0%	SR
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	152.378.000	41.406.200	0	0%	0%	SR
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	378.784.300	206.124.300	0	0%	0%	SR
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	120.000.000	119.999.700	0	0%	0%	SR
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	119.999.700	0	0%	0%	SR
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40.000.000	39.801.000	0	0%	0%	SR
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	40.000.000	32.224.700	0	0%	0%	SR
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	40.000.000	47.974.000	0	0%	0%	SR
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	48.010.700	119.999.400	0	0%	0%	SR
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan	48.010.700	119.999.400	0	0%	0%	SR

	Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	48.010.700	119.999.400	0	0%	0%	SR

Dari tabel pencapaian target anggaran dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi Anggaran Pagu DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I (31 Maret 2025) sebesar **Rp. 1.163.918.866** atau **16,33%** dan Realisasi Anggaran Pagu RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I (31 Maret 2025) sebesar **Rp. 1.163.918.866** atau **15,89%**.
2. Status pencapaian realisasi anggaran pada Triwulan I (31 Maret 2025) terdiri dari Status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 1 Sub Kegiatan, Status Tinggi (T) sebanyak 0 Sub Kegiatan, Status Sedang (S) sebanyak 0 Sub Kegiatan, Status Rendah (R) sebanyak 0 Sub Kegiatan dan Status Sangat Rendah (SR) sebanyak 26 Sub Kegiatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tana Tidung

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TANA TIDUNG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Real isasi Cap aian REN JA OPD Tah un 202 3	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelu m	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasio nal				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							7.326.000.000,00	7.128.715.100,00	6.029.965.178,00					6.874.300.000,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.326.000.000,00	7.128.715.100,00	6.029.965.178,00					6.874.300.000,00				
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							7.326.000.000,00	7.128.715.100,00	6.029.965.178,00					6.874.300.000,00				
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	5.517.420.000,00	5.731.634.500,00	5.275.715.328,00						5.689.300.000,00			
	2	18	01	20	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Laporan Sakip dan Keuangan	-			-	100 %	26.999.600,00	26.999.500,00	26.999.500,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan	Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		33.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	20	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.600,00	12.000.200,00	1.806.200,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2001	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	14.999.000,00	14.999.300,00	1.407.300,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2002		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ASN	-			-	100 %	4.227.734.832,00	4.186.420.432,00	4.186.420.432,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan	Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4.330.000,00,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2002	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	4.062.014.832,00	4.027.650.432,00	4.027.651.055,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			4.100.000,00,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2002	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	165.720.000,00	158.770.000,00	158.770.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Pakaian Dinas dan tersedianya ASN yang terdidik dan terlatih	-			-	100 %	135.447.000,00	49.137.000,00	49.137.000,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	20052		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	31.185.000,00	0,00	0,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	20059		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	104.262.000,00	49.137.000,00	23.665.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2006		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan kantor	-			-	90 %	597.325.938,00	818.741.118,00	818.741.118,00			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		660.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	20061		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.443.500,00	54.887.000,00	54.887.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	20062		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	87.223.000,00	193.750.900,00	105.044.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	20064		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.130.238,00	123.506.218,00	96.453.718,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2006	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.668.200,00	56.887.000,00	42.143.600,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2006	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	303.861.000,00	389.710.000,00	202.021.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			320.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2007		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-			-	100 %	48.188.660,00	48.188.660,00	48.188.660,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2007	005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	48.188.660,00	48.188.660,00	48.188.660,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-			-	100 %	317.416.400,00	317.416.400,00	317.416.400,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan	Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		322.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2008	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			4.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2 . 0 8	0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	130.594.000,00	130.594.000,00	130.594.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			135.000.000, 00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2 . 0 8	0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	182.822.400,00	182.822.400,00	182.822.400,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			183.000.000, 00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-			-	100 %	164.307.570,00	284.731.390,00	284.731.390,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan	Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		164.000.000, 00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2 . 0 9	0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	76.480.000,00	67.680.000,00	67.680.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			64.000.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2 . 0 9	0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	27.830.000,00	19.290.000,00	17.460.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	1 Unit	59.997.570,00	197.761.390,00	111.121.395,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pembuatan Dokumen Kebijakan Penanaman Modal (Dengan Satuan:%)				100 %	100 %	179.980.800,00	4.662.000,00	4.662.000,00							190.000.000,00		
	2	18	02	2011		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Penetapan pemberian fasilitas/ insetif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota	-			-	1 Dokumen	179.980.800,00	4.662.000,00	4.662.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan	Pelaku Usaha/ Masyarakat			190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2014		Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																		
							Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				1 Dokumen	1 Dokumen	179.980.800,00	4.662.000,00	4.662.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Ketertarikan Investor yang akan berinvestasi				2 Investor	2 Investor	535.974.300,00	521.602.100,00	388.533.350,00							230.000.000,00		
	2	18	03	201		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	-			-	3 Dokumen	535.974.300,00	521.602.100,00	521.602.100,00			-	-	Pelaku Usaha/ Masyarakat			230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	1 8	0 3	2 - 0 1 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokume n	1 Dokume n	109.995.500,00	259.000,00	259.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 3	2 - 0 1 3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokume n	1 Dokume n	425.978.800,00	521.343.100,00	388.274.350,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	1 8	0 4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Usaha yang memenuhi aspek Legal				90 %	90 %	924.614.200,00	630.817.400,00	200.525.100,00							505.000.000,00	
	2	1 8	0 4	2 - 0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			-	100 %	924.614.200,00	630.817.400,00	630.817.400,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan	Pelaku Usaha/Masy arakat		505.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 4	2 - 0 1 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				70 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	397.451.900,00	383.286.900,00	108.535.700,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 4	2 - 0 1 7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	152.378.000,00	41.406.200,00	33.885.100,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			155.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	1	0	2	0	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				100 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	374.784.300,00	206.124.300,00	58.104.300,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
5	2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM				78.57 %	78.57 %	120.000.000,00	119.999.700,00	88.453.500,00						150.000.000,00		
	2	1	0	2	0	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang melaporkan kegiatan Penanaman Modal secara akuntabel dan tepat waktu	-			-	100 %	120.000.000,00	119.999.700,00	119.999.700,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan	Pelaku Usaha/Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2	0	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya																	
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya				22 Kegiatan Usaha.	6 Kegiatan Usaha.	40.000.000,00	39.801.000,00	28.732.500,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	1	0	2	0	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	40.000.000,00	32.224.700,00	28.517.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	1	0	2	0	Pengawasan Penanaman Modal																	

							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					5 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	40.000.000,00	47.974.000,00	31.204.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan				50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengaduan yang terselesaikan/tertangani sesuai SOP, Persentase Hasil survei Kepuasan Masyarakat yang ditindaklanjuti					100 %	100 % 100 %	48.010.700,00	119.999.400,00	72.075.900,00								110.000.000,00	
	2	18	06	201		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Responden yang mengisi Survei Kepuasan Masyarakat Persentase informasi terkait pengaduan yang tersampaikan Persentase konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai SOP	-				-	100 % 200 Respon den	48.010.700,00	119.999.400,00	119.999.400,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan	Pelaku Usaha/ Masy arakat			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	201	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																			
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					1 Dokumen	3 Dokumen	48.010.700,00	119.999.400,00	72.075.900,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Serta Peningkatan Ketahanan Pangan				110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H													7.326.000.000,00	7.128.715.100,00	6.029.965.178,00						6.874.300.000,00			

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2025 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai program dan kegiatan terkait dengan pelayanan perizinan sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan yang berbasis pada pelayanan, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung adalah Program dan Kegiatan Tahunan yang selaras dengan Visi & Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tana Tidung. Pada tahun anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung melaksanakan 6 (enam) Program yang terbagi atas 12 (dua belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan.

Secara umum realisasi fisik dan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Triwulan I Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun rata - rata pencapaian kinerja **5,5%** (Kategori Sangat Rendah) dan Realisasi Keuangan mencapai **Rp.**

1.163.918.866,- atau rata - rata capaian Anggaran **1,59%** (Kategori Sangat Rendah).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung selain menjadi pedoman dan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), khususnya bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung. Disamping itu, Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa – masa yang akan datang.

Tideng Pale, 23 Mei 2025

Kepala Dinas,



Arman Jauhari, SH

NIP.19750709 200212 1 003